



MENAKAR TREN HARGA BERAS DI TENGAH KECUKUPAN STOK NASIONAL: MOMENTUM OPTIMALISASI DISTRIBUSI

Ari Mulianta Ginting*

Abstrak

Pada pertengahan 2025, harga beras di Indonesia mengalami kenaikan pada saat stok nasional melimpah, dengan cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai lebih dari 1,8 juta ton. Artikel ini menyoroti distribusi sebagai titik lemah tata kelola pangan nasional. Permasalahan logistik, kurangnya data real-time, lemahnya integrasi lintas institusi, dan struktur pasar yang oligopolistik menyebabkan ketidaksesuaian antara pasokan dan kebutuhan di lapangan. Intervensi pemerintah melalui program seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum optimal dalam menahan laju harga. Diperlukan penguatan pengawasan lintas sektor, audit distribusi berkala, digitalisasi sistem logistik pangan, serta koordinasi erat dengan lembaga pengawas seperti KPPU. Komisi IV DPR RI perlu mendorong penguatan infrastruktur distribusi dari hulu ke hilir. Dengan pengawasan yang aktif dan berbasis bukti, Komisi VI DPR RI diharapkan dapat mendorong instansi terkait menuju distribusi beras yang adil, efisien, dan adaptif, guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.

Pendahuluan

Harga beras sebagai komoditas pangan utama memiliki dampak signifikan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat, serta menjadi isu strategis dalam konteks sosial-politik nasional. Pada triwulan II 2025, data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan kecukupan stok beras nasional yakni sebesar 1,8 juta ton (Bapanas, 2025), namun harga eceran beras terus menunjukkan tren peningkatan. Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) mencatat inflasi harga beras sebesar 1,27% pada Juni 2025 secara *month-to-month*, dengan kenaikan merata di berbagai provinsi, termasuk daerah sentra produksi seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan harga bukan disebabkan oleh faktor produksi, melainkan karena belum optimalnya distribusi dan tata niaga beras nasional.

Kondisi ini menegaskan urgensi reformasi tata kelola distribusi beras nasional melalui pembenahan rantai pasok, penguatan peran BUMN pangan, dan percepatan digitalisasi distribusi demi efisiensi dan transparansi. Pengawasan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan akuntabilitas kebijakan, efektivitas program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta sinergi lintas lembaga dalam pembenahan sistem distribusi nasional (Saputra, 2025; Kementerian BUMN, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: ari.ginting@dpr.go.id

DPR RI memiliki peran strategis dalam mendorong optimalisasi fungsi intervensi pasar oleh Bulog, percepatan adopsi teknologi informasi dalam logistik pangan, serta alokasi anggaran yang tepat sasaran dalam program stabilisasi harga dan distribusi pangan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan distribusi dan gejolak harga beras di tengah kondisi stok nasional yang memadai, guna merumuskan rekomendasi pengawasan dan kebijakan yang lebih efektif oleh Komisi VI DPR RI.

Analisis Tren Harga dan Ketersediaan Beras

Produksi beras nasional selama semester pertama tahun 2025 menunjukkan tren yang relatif stabil. Hal ini ditopang oleh kondisi iklim yang mendukung serta peningkatan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ketersediaan stok nasional pun terjaga dalam level aman. Namun demikian, kestabilan pasokan ini belum sepenuhnya tercermin dalam harga di tingkat konsumen, terutama di pasar tradisional di wilayah Jabodetabek dan Jawa Tengah. Harga beras medium dan premium di sejumlah daerah terpantau melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp10.900/kg untuk beras medium dan Rp13.900/kg untuk beras premium (Bapanas, 2025).

Salah satu penyebab utama ketidaksesuaian antara ketersediaan stok dan harga di pasar adalah hambatan distribusi, baik dari aspek logistik maupun keterbatasan data. Data Bapanas (Bapanas, 2025) menunjukkan adanya keterlambatan distribusi dari gudang Bulog ke konsumen akhir, yang menyebabkan kelangkaan di pasar tradisional. Masalah ini diperburuk oleh tidak tersedianya sistem data distribusi yang terintegrasi secara real-time antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah. Akibatnya, respons pemerintah terhadap dinamika pasokan dan permintaan di lapangan kerap terlambat. Hal ini mendorong pengecer menaikkan harga sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kelangkaan, yang pada gilirannya memperparah gejolak harga (Arifah, 2025). Kondisi ini kontras dengan distribusi di outlet modern, seperti ritel besar dan minimarket, yang cenderung lebih stabil karena memiliki sistem logistik tersendiri dan akses langsung terhadap pemasok utama (Arifah, 2025).

Untuk merespons gejolak harga dan menjaga kestabilan pasokan, pemerintah melalui Perum Bulog meluncurkan program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Program ini menargetkan penyaluran sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli–Desember 2025 (Dwi, 2025). Direktur Operasional Perum Bulog, Mokhammad Suyamto, menyampaikan bahwa SPHP dan bantuan pangan menjadi dua instrumen utama untuk menstabilkan harga dan memastikan pasokan di pasar tradisional tetap tersedia (Perum Bulog, 2025). Namun demikian, tantangan logistik dan kurangnya koordinasi antarlembaga masih membatasi efektivitas program tersebut, terutama di kawasan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi seperti Jabodetabek dan Jawa Tengah (Perum Bulog, 2025).

Lebih lanjut, studi kasus di Kabupaten Bima memberikan gambaran konkret mengenai kendala teknis dan geografis dalam distribusi beras bantuan. Penelitian yang menggunakan

metode *Six Sigma (Define, Measure, Analyze, Improve, Control/DMAIC)* mengidentifikasi empat penyebab utama keterlambatan distribusi, yaitu kondisi jalan yang rusak (42%), lokasi penerima manfaat yang terpencil (28%), cuaca buruk (24%), dan keterbatasan armada truk pengangkut (6%). Temuan ini menegaskan perlunya investasi infrastruktur logistik dan peningkatan kapasitas manajemen distribusi, terutama untuk menjangkau daerah-daerah dengan karakteristik geografis sulit. (Amalia, dkk., 2025).

Penguatan Pengawasan Distribusi dan Tata Niaga Beras

Berdasarkan kondisi di atas, untuk mengatasinya, diperlukan modernisasi sistem distribusi pangan berbasis digital yang mampu memantau pergerakan pasokan secara *real-time*. Implementasi teknologi seperti *blockchain* dan *Internet of Things (IoT)* dalam rantai pasok pangan telah terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi di negara-negara seperti India dan Vietnam. Di Indonesia, *pilot project* digitalisasi distribusi pangan yang dilakukan oleh Perum Bulog dan Bapanas masih bersifat terbatas dan belum menyentuh semua lapisan rantai pasok (CNBC Indonesia, 2024). Oleh karena itu, perlu regulasi dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang lebih kuat untuk mendorong perluasan sistem logistik digital terintegrasi nasional. Hal ini semakin memperjelas urgensi penguatan lembaga pengawasan tata niaga yang berfungsi lintas sektor, dengan wewenang penindakan terhadap praktik kartel dan penimbunan stok beras.

Kenaikan harga beras pada pertengahan 2025 menunjukkan masih lemahnya distribusi pangan nasional, meskipun CBP Bulog tercatat lebih dari 4 juta ton. Harga beras medium dan premium naik masing-masing menjadi Rp13.772/kg dan Rp15.725/kg, mencerminkan ketidaksesuaian antara stok dan harga yang dipicu oleh hambatan distribusi, lemahnya pengawasan, dan kurang optimalnya intervensi pasar. Data di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) menunjukkan bahwa realisasi distribusi hanya sebesar 2.368 ton dari 11.410 ton yang dilaporkan, mengindikasikan adanya distorsi antara pelaporan dan kondisi riil. Rendahnya realisasi ini diduga disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk hambatan distribusi teknis di lapangan seperti keterlambatan logistik dan ketidaksiapan infrastruktur, serta potensi perilaku spekulatif seperti penimbunan oleh pelaku usaha yang mengantisipasi kenaikan harga. Kondisi ini menekankan pentingnya pengawasan yang lebih intensif dari Komisi VI DPR RI agar data distribusi mencerminkan kondisi faktual dan intervensi kebijakan dapat lebih tepat sasaran (Ayuningrum, 2025).

Komisi VI DPR RI berperan dalam pengawasan distribusi beras. Pengawasan perlu diarahkan pada evaluasi kebijakan distribusi, efektivitas operasi pasar, dan dorongan revisi kewenangan Bulog agar lebih berperan dalam stabilisasi harga dan pasokan. Komisi VI juga perlu mendorong integrasi data pangan antar instansi untuk mendukung keputusan berbasis bukti. Kolaborasi dengan Komisi IV dalam penguatan infrastruktur pasca-panen akan memperbaiki distribusi pangan dari hulu ke hilir secara lebih efisien dan responsif.

Penutup

Fenomena kenaikan harga beras di tengah kecukupan stok menunjukkan adanya disfungsi sistem distribusi dan lemahnya integrasi data antarinstansi. Komisi VI DPR RI berperan strategis dalam mengawasi tata niaga dan distribusi beras agar lebih adil, efisien, dan transparan. Pengawasan perlu diperkuat terhadap kinerja Kementerian Perdagangan, Bapanas, dan program distribusi Bulog, termasuk audit berkala atas stok dan rantai pasok. Komisi VI juga dapat bersinergi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi potensi kartel dan penimbunan. Kolaborasi lintas kementerian, swasta, dan pemerintah daerah penting untuk mengatasi disparitas harga dan memastikan akses pangan merata.

Lebih lanjut, Komisi VI juga berperan strategis dalam mendorong modernisasi sistem logistik pangan nasional melalui digitalisasi distribusi dan integrasi data *real-time* lintas sektor. Kolaborasi lintas komisi, seperti dengan Komisi IV DPR RI, dan lembaga seperti KPPU menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif. Penguatan peran pengawasan ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan penimbunan, sekaligus memastikan distribusi beras berlangsung adil, efisien, dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan Komisi VI DPR RI dilaksanakan secara proaktif dalam mengawal ketahanan pangan nasional.

Referensi

- Amalia, A., Purnawan, P., & Rahman, A. Z. (2025). Analisis keterlambatan distribusi beras bantuan pangan oleh Perum Bulog Kancab Bima menggunakan metode Six Sigma. *Jurnal Logistik Indonesia*, 18(1), 45–58. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/logistik/article/view/54198>
- Arifah, N. (2024). *Evaluasi implementasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Kota Balikpapan* (Skripsi, Universitas Mulawarman). FISIP UNMUL Institutional Repository. <https://library.fisip-unmul.ac.id/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ef0ae9274bbd1c4a760771c7545f68f7>
- Ayuningrum, R. (2025, Juli 1). Kok bisa harga beras naik terus saat stoknya berlimpah?. *detikFinance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7989567/kok-bisa-harga-beras-naik-terus-saat-stoknya-berlimpah>.
- Badan Pangan Nasional. (2025, Juni 15). Cadangan beras pemerintah capai 1,8 juta ton: Fokus ke distribusi wilayah rawan pangan. <https://bapanas.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025, Juli 1). Perkembangan indeks harga konsumen Juni 2025. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2025/07/01/press-release-ihk-juni-2025.html>
- CNBC Indonesia. (2024, November 12). Digitalisasi distribusi pangan dinilai mampu tekan lonjakan harga. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241112104510-4-523847>
- Dwi, N. M. (2025, Juli 12). Jaga stabilitas harga dan pasokan, Bulog akan salurkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025. *Kabar BUMN*. <https://www.kabarbumn.com/rilis-bumn/116288873/jaga-stabilitas-harga-dan-pasokan-bulog-akan-salurkan-1-3-juta-ton-beras-sphp-hingga-desember-2025>

- Kementerian BUMN. (2025). *Rencana aksi transformasi distribusi pangan nasional 2025–2030*. Kementerian BUMN.
- Perum Bulog. (2025, Juli 11). Jaga stabilisasi pasokan dan harga beras, Perum Bulog salurkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun 2025. <https://www.bulog.co.id/2025/07/11/jaga-stabilisasi-pasokan-dan-harga-beras-perum-bulog-salurkan-13-juta-ton-beras-sphp-hingga-akhir-tahun-2025>
- Saputra, D. H. (2025). Peran pengawasan DPR dalam reformasi distribusi pangan nasional. *Jurnal Kebijakan dan Legislatif*,10(1), 55–69. <https://doi.org/10.31234/jkl.v10i1.235>

